



KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

Nomor : B-777/01000/ES/2024

Jakarta, 17 September 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) set

Hal : Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (EPSS)

Yth. Bupati Mamuju

di -

Tempat

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik memberikan mandat kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengembangkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien. Terkait hal tersebut, dengan berpedoman pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor, BPS telah melakukan evaluasi atas penyelenggaraan statistik sektoral tahun 2024 pada **Pemerintah Kabupaten Mamuju**.

Tujuan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (EPSS) adalah untuk mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral, meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada instansi pusat dan pemerintahan daerah. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dan rekomendasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan **Pemerintah Kabupaten Mamuju**.

Berdasarkan hasil EPSS, nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) **Pemerintah Kabupaten Mamuju** tahun 2024 adalah **1,94** dengan predikat "**Cukup**". Rincian hasil evaluasi dan rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral disampaikan sebagaimana terlampir.

Demikian laporan hasil pelaksanaan EPSS tahun 2024 di lingkungan **Pemerintah Kabupaten Mamuju**. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam penyelenggaraan statistik sektoral dan pengembangan Sistem Statistik Nasional. Selanjutnya, hasil EPSS ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral secara berkelanjutan di lingkungan **Pemerintah Kabupaten Mamuju**.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami sampaikan terima kasih.

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik,

Amalia Adininggar Widhyasanti

Tembusan:

1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
3. Menteri Dalam Negeri.



Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor 2024

Pemerintah Kabupaten Mamuju



BADAN PUSAT STATISTIK





EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.
- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024.
- Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

PENJELASAN UMUM

Statistik memiliki arti penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional. Kegiatan statistik dituntut untuk menghasilkan statistik yang berkualitas, cepat, dan beragam sesuai kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, diperlukan pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik pada instansi pemerintah.

EPSS adalah suatu proses penilaian yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral. Secara detail, penyelenggaraan EPSS bertujuan untuk:

- mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintahan daerah;
- meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintahan daerah; dan
- meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada instansi pusat dan pemerintahan daerah.

Keluaran EPSS adalah Indeks Pembangunan Statistik (IPS), yaitu suatu indikator yang menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di masing-masing instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral. Indeks ini, selain disajikan secara umum, juga disajikan menurut domain dan aspek. IPS merupakan salah satu indikator penilaian Reformasi Birokrasi (RB) General untuk seluruh instansi pemerintah. Disamping itu, IPS juga dapat menjadi ukuran dalam pencapaian pelaksanaan Satu Data Indonesia dan penyelenggaraan urusan statistik di tingkat pemerintahan daerah.





METODOLOGI

EPSS dilaksanakan pada seluruh instansi pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral. Penilaian EPSS dilakukan melalui berbagai tahapan, mencakup tahapan penilaian mandiri, penilaian dokumen, dan penilaian interviu, serta penilaian visitasi jika diperlukan.

EPSS mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pemerintah yang terdiri atas 5 (lima) tingkat kematangan sebagaimana dijelaskan pada Tabel 1.

Tabel 1
Tingkat Kematangan dan Kriteria dalam EPSS

Tingkat Kematangan (1)	Kriteria (2)
Level 1 Rintisan	Proses penyelenggaraan statistik sektoral belum dilakukan oleh seluruh unit kerja.
Level 2 Terkelola	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan oleh seluruh unit kerja, namun masih menggunakan standar yang hanya berlaku di unit kerja itu sendiri.
Level 3 Terdefinisi	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah diharmonisasi dan kemudian ditetapkan sebuah standar/pedoman oleh unit yang melaksanakan fungsi manajemen dan berlaku untuk seluruh unit kerja dalam organisasi.
Level 4 Terpadu dan Terukur	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan secara terpadu dan telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penyelenggaraan statistik sektoral dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses
Level 5 Optimum	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan peningkatan kualitas secara berkesinambungan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi.

EPSS menghasilkan Indeks Pembangunan Statistik dengan predikat yang disajikan dalam Tabel 2

Tabel 2
Predikat Indeks Hasil EPSS

Nilai (1)	Predikat (2)
4,2 – 5,0	Memuaskan
3,5 – <4,2	Sangat Baik
2,6 – <3,5	Baik
1,8 – <2,6	Cukup
< 1,8	Kurang





Adapun cakupan yang dinilai dari EPSS meliputi 5 domain, 19 aspek, dan 38 indikator.

DOMAIN	ASPEK & INDIKATOR									
Prinsip Satu Data Indonesia	Standar Data Statistik		Metadata Statistik			Interoperabilitas Data			Kode Referensi dan/atau Data Induk	
	Standar Data Statistik		Metadata Statistik			Interoperabilitas Data			Kode Referensi	
Kualitas Data	Relevansi		Akurasi	Aktualitas & Ketepatan Waktu		Aksesibilitas			Keterbandingan & Konsistensi	
	Relevansi Data	Identifikasi Kebutuhan	Akurasi Data	Aktualitas Data	Ketepatan Diseminasi	Ketersediaan Data	Akses Media Penyebarluasan	Format Data	Keterbandingan Data	Konsistensi Statistik
Proses Bisnis Statistik	Perencanaan Data			Pengumpulan Data		Pemeriksaan Data		Penyebarluasan Data		
	Pendefinisian Kebutuhan	Desain Statistik	Penyiapan Instrumen	Proses Pengumpulan/Akuisisi		Pengolahan	Analisis	Diseminasi		
Kelembagaan	Profesionalitas				SDM yang Memadai dan Kapabel		Pengorganisasian Statistik			
	Transparansi Informasi	Netralitas dan Objektivitas	Kualitas Data	Konfidensialitas Data	SDM Statistik	SDM Manajemen Data	Kolaborasi Kegiatan Statistik	Forum SDI	Kolaborasi Pembina Statistik	Tugas Walidata
Statistik Nasional	Pemanfaatan Data Statistik			Pengelolaan Kegiatan Statistik				Penguatan SSN Berkelanjutan		
	Penggunaan Statistik Dasar	Penggunaan Statistik Sektoral	Sosialisasi dan Literasi Data	Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik				Perencanaan Pembangunan Statistik	Penyebarluasan Data	Pemanfaatan Big Data

Catatan:

Domain Aspek Indikator

INDEKS PEMBANGUNAN STATISTIK NASIONAL

Tabel 3
Nilai Indeks Hasil EPSS 2024 menurut Domain dan Jenis Instansi Pemerintah

Indeks	Nasional	Jenis Instansi Pemerintah					
		Kementerian	LPNK	Instansi Lain	Pemprov	Pemkab	Pemkota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
IPS	2,35	2,78	2,81	2,25	2,55	2,25	2,51
Domain Prinsip SDI	2,43	2,96	2,97	2,21	2,68	2,31	2,64
Domain Kualitas Data	2,27	2,71	2,76	2,23	2,36	2,17	2,41
Domain Proses Bisnis Statistik	2,47	2,86	2,89	2,44	2,59	2,38	2,58
Domain Kelembagaan	2,32	2,80	2,83	2,28	2,50	2,20	2,48
Domain Statistik Nasional	2,20	2,37	2,40	2,00	2,60	2,12	2,35





HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 2024

KEGIATAN STATISTIK SEKTORAL

Kegiatan statistik sektoral yang dinilai pada Pemerintah Kabupaten Mamuju adalah:

- Pendaftaran Pelaku Usaha Perikanan di Kabupaten Mamuju, Tahun 2023
- Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA*) Kabupaten Mamuju, Tahun 2023

HASIL PENILAIAN

Hasil penilaian dapat dilihat secara rinci pada Tabel 4 dan Tabel 5.

Tabel 4
Nilai Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai Indeks Domain

Domain	Bobot	Nilai Harapan	Nilai Nasional	Nilai Hasil Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Domain Prinsip SDI	28%	2,60	2,43	1,50
Domain Kualitas Data	24%	2,60	2,27	2,27
Domain Proses Bisnis Statistik	19%	2,60	2,47	2,37
Domain Kelembagaan	17%	2,60	2,32	1,61
Domain Statistik Nasional	12%	2,60	2,20	2,11
Indeks Pembangunan Statistik	100%	2,60	2,35	1,94





Tabel 5
Nilai Indeks Aspek

Domain/Aspek (1)	Bobot ¹ (2)	Nilai Indeks (3)
Domain Prinsip SDI		
Standar Data Statistik	25%	1,00
Metadata Statistik	25%	1,00
Interoperabilitas Data	25%	1,00
Kode Referensi dan/atau Data Induk	25%	3,00
Domain Kualitas Data		
Relevansi	21%	2,20
Akurasi	16%	3,00
Aktualitas & Ketepatan Waktu	21%	3,00
Aksesibilitas	21%	2,34
Keterbandingan & Konsistensi	21%	1,00
Domain Proses Bisnis Statistik		
Perencanaan Data	32%	1,68
Pengumpulan Data	26%	3,00
Pemeriksaan Data	21%	2,00
Penyebarluasan Data	21%	3,00
Domain Kelembagaan		
Profesionalitas	35%	2,50
SDM yang Memadai dan Kapabel	30%	1,00
Pengorganisasian Statistik	35%	1,25
Domain Statistik Nasional		
Pemanfaatan Data Statistik	34%	2,00
Pengelolaan Kegiatan Statistik	33%	3,00
Penguatan SSN Berkelanjutan	33%	1,33

Catatan: ¹ Bobot aspek pembentuk indeks domain





KEUNGGULAN, KEKURANGAN, DAN REKOMENDASI

1. Domain Prinsip Satu Data Indonesia

Keunggulan:

- Penerapan Aspek Kode Referensi dan/atau Data Induk di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju telah mencapai predikat baik. Walidata telah memerintahkan ke seluruh produsen data dengan kaidah yang tepat berupa buku pedoman dan dibuktikan dengan dokumen administrasi yang relevan terkait penerapan kode referensi.

Kekurangan:

- Penerapan Aspek Standar Data Statistik, Aspek Metadata Statistik, dan Aspek Interoperabilitas Data masih berada pada kategori kurang. Variabel-variabel yang digunakan dan indikator-indikator yang dihasilkan dari kegiatan statistik di Pemerintah Kabupaten Mamuju belum menerapkan Standar Data Statistik Nasional. Selain itu, kegiatan statistik tersebut juga belum dilengkapi dengan metadata statistik sesuai dengan struktur dan format baku yang ditetapkan oleh pembina data statistik. Untuk Interoperabilitas data, belum diterapkan oleh produsen data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju.

Rekomendasi:

- Pemerintah Kabupaten Mamuju perlu menerapkan indikator-indikator pada Aspek Standar Data Statistik, Metadata Statistik, dan Interoperabilitas Data pada kegiatan statistik yang dilakukan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan kelengkapan dokumen administrasi yang sesuai atau relevan terkait penerapan indikator tersebut.
- Pemerintah Kabupaten Mamuju perlu membuat jadwal reviu dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan prinsip Satu Data Indonesia serta melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas secara berkelanjutan.

2. Domain Kualitas Data

Keunggulan:

- Penerapan Aspek Relevansi serta Aspek Aktualitas dan Ketepatan Waktu telah mencapai predikat baik. Selain itu, penerapan Aspek Relevansi terkait kematangan relevansi data terhadap pengguna dan Aspek Aksesibilitas terkait ketersediaan data untuk pengguna data dan akses media penyebarluasan data telah mencapai tingkat kematangan terdefinisi. Hal tersebut didukung dengan dokumen administrasi yang relevan yaitu berupa dokumen regulasi/kebijakan dari walidata di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju.





Kekurangan:

- Penerapan Aspek Keterbandingan dan Konsistensi masih berada pada predikat kurang. Selain itu, penerapan Aspek Relevansi terkait proses identifikasi kebutuhan data dan Aspek Aksesibilitas terkait penyediaan format data masih berada pada tingkat kematangan rintisan. Penerapan pada indikator-indikator tersebut belum dilakukan oleh produsen data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju. Belum terdapat bukti dukung terkait hal tersebut.

Rekomendasi:

- Pemerintah Kabupaten Mamuju perlu melakukan proses identifikasi kebutuhan data, penyediaan format data, keterbandingan data, dan konsistensi data untuk meningkatkan kualitas data. Pemerintah Kabupaten Mamuju juga perlu menyusun dokumen kebijakan dan SOP/petunjuk teknis yang lebih rinci terkait penerapan indikator tersebut.
- Pemerintah Kabupaten Mamuju perlu melakukan reviu SOP/Buku pedoman tentang kualitas data agar nilai tingkat kematangan indikator bisa lebih dari predikat terdefinisi.

3. Domain Proses Bisnis Statistik

Keunggulan:

- Penerapan Aspek Perencanaan Data terkait penyiapan instrumen, Aspek Pengumpulan Data, Aspek Pemeriksaan Data terkait pengolahan data, dan Aspek Penyebarluasan Data telah dilakukan oleh masing-masing produsen data. Aspek ini juga sudah dilengkapi dengan dokumen kebijakan serta SOP yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, penerapan indikator pada aspek tersebut sudah mencapai tingkat kematangan terdefinisi.

Kekurangan:

- Penerapan Aspek Perencanaan Data terkait pendefinisian kebutuhan statistik dan desain statistik, Aspek Pemeriksaan Data terkait analisis data belum diterapkan oleh produsen data di Pemerintah Kabupaten Mamuju sehingga masih dalam tingkat kematangan rintisan. Belum ada dokumen kebijakan yang mengatur penerapan indikator pada aspek tersebut.

Rekomendasi:

- Pemerintah Kabupaten Mamuju perlu melakukan kegiatan pendefinisian kebutuhan statistik, desain statistik dan proses analisis data. Pemerintah





Kabupaten Mamuju juga perlu menyusun dokumen kebijakan dan SOP/petunjuk teknis yang lebih rinci terkait indikator tersebut.

- Pemerintah Kabupaten Mamuju selanjutnya dapat melakukan reviu dan evaluasi dari kegiatan statistik sektoral yang sebelumnya dilakukan berdasarkan dokumen kebijakan dan SOP yang telah dibuat.

4. Domain Kelembagaan

Keunggulan:

- Penerapan Aspek Profesionalitas terkait penjaminan transparansi informasi statistik, penjaminan netralitas dan objektivitas terhadap penggunaan sumber data metodologi, serta penjaminan konfidensialitas data sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju dalam menyelenggarakan statistik sektoral. Aspek ini juga telah didukung dengan dokumen kebijakan serta SOP/Prosedur yang tepat yang mengatur penerapannya.

Kekurangan:

- Penerapan Aspek penjaminan kualitas data, Aspek SDM yang Memadai dan Kapabel, Aspek Pengorganisasian Statistik belum dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju dalam melaksanakan kegiatan statistik sektoral. Dengan demikian aspek ini hanya mendapat predikat rintisan.
- Penerapan indikator kolaborasi dengan pembina statistik dilakukan oleh masing-masing produsen data sesuai dengan standarnya masing-masing. Namun belum ada dokumen kebijakan yang mengatur kolaborasi dengan pembina statistik di Pemerintah Kabupaten Mamuju sehingga hanya mendapat predikat terkelola.

Rekomendasi:

- Pemerintah Kabupaten Mamuju perlu melakukan reviu dan evaluasi secara berkala baik pada pelaksanaan penyebaran data maupun dokumen kebijakan dan prosedur yang mengatur proses penyebaran data.
- Pemerintah Kabupaten Mamuju perlu melakukan kegiatan penjaminan kualitas data, pelatihan SDM di bidang statistik dan manajemen data, kolaborasi penyelenggaraan kegiatan statistik dan menyelenggarakan forum satu data untuk semua produsen data serta memastikan walidata Pemerintah Kabupaten Mamuju melaksanakan tugasnya yang didukung dengan dokumen kebijakan yang baku serta SOP/Prosedur yang lebih rinci terkait pelaksanaan aspek tersebut.





5. Domain Statistik Nasional

Keunggulan:

- Penerapan Aspek Pengelolaan Kegiatan Statistik telah mencapai predikat baik. Penerapan pelaksanaan rekomendasi kegiatan statistik telah dilakukan oleh seluruh produsen data berdasarkan prosedur baku yang telah ditetapkan. Aspek ini juga sudah dilengkapi dengan dokumen kebijakan serta SOP yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya.

Kekurangan:

- Penerapan Aspek Pemanfaatan Data Statistik masih berada pada predikat cukup. Aspek Penguatan Sistem Statistik Nasional (SSN) Berkelanjutan masih berada pada predikat kurang.
- Penerapan Aspek Pemanfaatan Data Statistik dan Aspek Penguatan SSN Berkelanjutan terkait penyebaran data telah dilakukan oleh masing-masing produsen data sesuai dengan standarnya masing-masing. Belum ada dokumen kebijakan yang mengatur pemanfaatan data statistik di Pemerintah Kabupaten Mamuju sehingga tingkat kematangannya terkelola.
- Penerapan Aspek Penguatan SSN Berkelanjutan terkait perencanaan pembangunan statistik dan pemanfaatan *big data* belum dilakukan oleh seluruh produsen data. Tidak ada dokumen administrasi yang dicantumkan.

Rekomendasi:

- Pemerintah Kabupaten Mamuju perlu menyusun SOP/petunjuk teknis yang lebih rinci terkait Pemanfaatan Data Statistik, Penyebarluasan Data, dan Penguatan SSN Berkelanjutan.
- Pemerintah Kabupaten Mamuju perlu melakukan reviu dan evaluasi secara berkala pada pelaksanaan rekomendasi kegiatan statistik maupun dokumen kebijakan dan prosedur yang mengatur proses pelaksanaan rekomendasi kegiatan statistik.
- Pemerintah Kabupaten Mamuju perlu melakukan kegiatan Perencanaan Pembangunan Statistik dan memanfaatkan *big data*.





TINGKAT KEMATANGAN PER INDIKATOR

Tabel 6
Nilai Bobot dan Tingkat Kematangan per Indikator

Domain	Aspek	Indikator	Bobot ¹	Tingkat Kematangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Prinsip Satu Data Indonesia	Standar Data Statistik	Tingkat Kematangan Penerapan Standar Data Statistik (SDS)	100%	1,00
	Metadata Statistik	Tingkat Kematangan Penerapan Metadata Statistik	100%	1,00
	Interoperabilitas Data	Tingkat Kematangan Penerapan Interoperabilitas Data	100%	1,00
	Kode Referensi dan/atau Data Induk	Tingkat Kematangan Penerapan Kode Referensi	100%	3,00
Kualitas Data	Relevansi	Tingkat Kematangan Relevansi Data terhadap Pengguna	60%	3,00
		Tingkat Kematangan Proses Identifikasi Kebutuhan Data	40%	1,00
	Akurasi	Tingkat Kematangan Penilaian Akurasi Data	100%	3,00
	Aktualitas & Ketepatan Waktu	Tingkat Kematangan Penjaminan Aktualitas Data	50%	3,00
		Tingkat Kematangan Pemantauan Ketepatan Waktu Diseminasi	50%	3,00
	Aksesibilitas	Tingkat Kematangan Ketersediaan Data untuk Pengguna Data	34%	3,00
		Tingkat Kematangan Akses Media Penyebarluasan Data	33%	3,00
		Tingkat Kematangan Penyediaan Format Data	33%	1,00
	Keterbandingan & Konsistensi	Tingkat Kematangan Keterbandingan Data	50%	1,00
		Tingkat Kematangan Konsistensi Statistik	50%	1,00
Proses Bisnis Statistik	Perencanaan Data	Tingkat Kematangan Pendefinisian Kebutuhan Statistik	33%	1,00



Domain	Aspek	Indikator	Bobot ¹	Tingkat Kematangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Tingkat Kematangan Desain Statistik	33%	1,00
		Tingkat Kematangan Penyiapan Instrumen	34%	3,00
	Pengumpulan Data	Tingkat Kematangan Proses Pengumpulan Data/Akuisisi Data	100%	3,00
	Pemeriksaan Data	Tingkat Kematangan Pengolahan Data	50%	3,00
		Tingkat Kematangan Analisis Data	50%	1,00
	Penyebarluasan Data	Tingkat Kematangan Diseminasi Data	100%	3,00
Kelembagaan	Profesionalitas	Tingkat Kematangan Penjaminan Transparansi Informasi Statistik	25%	3,00
		Tingkat Kematangan Penjaminan Netralitas dan Objektivitas terhadap Penggunaan Sumber Data Metodologi	25%	3,00
		Tingkat Kematangan Penjaminan Kualitas Data	25%	1,00
		Tingkat Kematangan Penjaminan Konfidensialitas Data	25%	3,00
	SDM yang Memadai dan Kapabel	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Statistik	50%	1,00
		Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Manajemen Data	50%	1,00
	Pengorganisasian Statistik	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik	25%	1,00
		Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia	25%	1,00
		Tingkat Kematangan Kolaborasi dengan Pembina Data Statistik	25%	2,00
		Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas Sebagai Walidata	25%	1,00
Statistik Nasional	Pemanfaatan Data Statistik	Tingkat Kematangan Penggunaan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, Monitoring, dan	34%	2,00



Domain	Aspek	Indikator	Bobot ¹	Tingkat Kematangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan		
		Tingkat Kematangan Penggunaan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan	33%	2,00
		Tingkat Kematangan Sosialisasi dan Literasi Data Statistik	33%	2,00
	Pengelolaan Kegiatan Statistik	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik	100%	3,00
	Penguatan SSN Berkelanjutan	Tingkat Kematangan Perencanaan Pembangunan Statistik	33%	1,00
		Tingkat Kematangan Penyebarluasan Data	33%	2,00
		Tingkat Kematangan Pemanfaatan <i>Big Data</i>	34%	1,00

Catatan: ¹ Bobot indikator pembentuk indeks aspek



DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telp: (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax: (021) 3863816

Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bpshq@bps.go.id

